

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo

Andi Soraya Aprilia, Harun Blongkod, Lukman Pakaya

Universitas Negeri Gorontalo

andisoraya150@gmail.com, blongkod@ung.ac.id, lukman.pakaya@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Accountability and Transparency of Budget Management on Financial Performance in Regional Apparatus Organizations (OPD) of Gorontalo Province. The method used in this study is a quantitative method with primary data obtained from questionnaire data whose measurements use an ordinal scale. The sample collection process uses purposive sampling or samples with certain criteria, namely based on criteria, namely OPD apparatus in the budget management sector with a total sample of 142 respondents and 29 OPDs in Gorontalo Province spread. The data analysis technique in this study uses Structural Equation Modeling (SEM) or Structural Equation Model operated through the AMOS 24 program. The results of the study indicate that accountability in budget management has no significant effect on OPD financial performance. Transparency in budget management has a positive and significant effect on financial performance. Simultaneously, accountability and transparency in budget management have a significant effect on OPD financial performance in Gorontalo Province explained by R-square 83.9%.

Keywords: Accountability, Transparency, Budget Management, Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Akuntabilitas dan Variabel Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuisisioner yang pengukurannya menggunakan skala ordinal. Proses pengumpulan sampelnya menggunakan *purposive sampling* atau sampel dengan kriteria tertentu yakni berdasarkan kriteria yaitu aparatur opd bidang pengelolaan anggaran dengan total sampel 142 responden dan OPD sebanyak 29 di Provinsi Gorontalo yang tersebar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* atau Model Persamaan Struktural yang dioperasikan melalui program AMOS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan OPD. Transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan OPD Provinsi Gorontalo dijelaskan dengan R-square 83,9%.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Anggaran, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintahan merupakan ukuran dan kemampuan untuk mewujudkan program-program pemerintah dalam mengelola dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien, serta akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan. Santoso, (2021) Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas dan efisiensi penanganan keuangan daerah. Kinerja ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kinerja keuangan pemerintahan ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang saling terkait, yaitu kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, pertumbuhan pendapatan dan keserasian. Kelima aspek tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.

Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan otonomi fiskal yang baik, sedangkan kemandirian yang rendah mengindikasikan ketergantungan besar terhadap pusat sehingga membatasi ruang gerak pembangunan daerah. Sinurat et al., (2023), kemandirian keuangan daerah tercermin apabila PAD memiliki porsi lebih besar dibandingkan dana transfer dari pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, Karena dana transfer, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, lebih banyak terdapat pada PAD, maka dana tersebut masih mempengaruhi pusat pemerintah dan tidak mencapai tingkat kemandirian fiskal yang ideal.

Keuangan daerah dinilai efektif bila realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai atau melampaui target anggaran. Jika realisasi jauh di bawah target, berarti efektivitas rendah dan pemerintah belum optimal mengelola potensi pendapatan maupun belanja daerah. Sudayo Y, Sjarif D, Sofiati N. A, (2017:13) efektivitas mendemonstrasikan kemampuan Pemda untuk menganalisis PAD yang diarahkan dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan rill daerah porensi.

Efisiensi keuangan daerah menilai perbandingan biaya dengan hasil yang dicapai dalam penyediaan layanan publik. Semakin efisien anggaran dikelola, semakin baik kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian Budiandriani et al., (2025) Pada Kota Makassar, pengelolaan keuangan daerah selama periode 2017-2022 termasuk kurang efisien, dengan rata-rata efisiensi sebesar 96,80%, meskipun efektivitasnya mencapai 92,21%.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah merupakan indikator penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD maupun total pendapatan secara berkelanjutan. Pertumbuhan yang stabil akan memperkuat kapasitas fiskal sehingga

pemerintah lebih mampu membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik secara optimal. Blongkod, (2023) Efisiensi keuangan daerah (REKD) menunjukkan selisih antara jumlah uang yang dibayarkan untuk pendapatan dengan pendapatan sebenarnya.

Keserasian menggambarkan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal sesuai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik. Alokasi anggaran yang seimbang mendukung keberlangsungan operasional sekaligus investasi pembangunan, sedangkan dominasi belanja rutin dapat menurunkan efektivitas pelayanan di masa depan.

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang unggul. Akuntabilitas memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan, bersifat transparan, jujur, dan mematuhi persyaratan hukum yang ada. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan dengan baik. (BPK, 2014)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial merupakan beberapa dimensi akuntabilitas anggaran pemerintah. Menurut Sangki et al., (2017) akuntabilitas pengelolaan anggaran pada pemerintahan biasanya diukur dengan beberapa indikator utama yang menggambarkan sejauh mana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran yang menekankan kepatuhan pada hukum serta penyajian informasi keuangan secara benar dan transparan, guna mencegah penyimpangan dan menjaga integritas pengguna dana publik. Menurut Sangki et al., (2017) Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran jabatan, korupsi, dan kolusi, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang ditetapkan dalam organisasi.

Akuntabilitas Manajerial dalam pengelolaan anggaran adalah tanggung jawab manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil untuk mendukung *good governance*. penelitian Murtin A. & Rahmawati S.I, (2023) menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, meskipun partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran tidak selalu signifikan.

Akuntabilitas program adalah dimensi yang menyoroti hubungan yang jelas antara anggaran alokasi dan tujuan serta hasil yang diinginkan. Dengan adanya akuntabilitas program, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur.

Akuntabilitas kebijakan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memastikan bahwa Setiap penggunaan anggaran untuk kepentingan publik dilakukan sesuai dengan kebijakan, rencana strategis, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Oktaviani et al., (2022) Akuntabilitas kebijakan dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengawasan keuangan negara berjalan efektif, transparan, serta mampu mencegah penyalahgunaan anggaran, khususnya dalam kondisi krisis.

Akuntabilitas Finansial merupakan dimensi krusial dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Menurut Muhtar, (2022) Akuntabilitas finansial dipahami sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melakukan transaksi keuangan secara transparan, efisien, dan patuh, yang dipastikan dengan penggunaan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan yang transparan, akurat, dan telah diaudit secara eksternal terutama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi indikator utama dimensi ini. Akuntabilitas finansial mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, memperkuat pengawasan publik dan legitimasi penggunaan dana publik.

Menurut Mardiasmo, (2018) Transparansi adalah prinsip mendasar dari manajemen keuangan publik yang baik karena meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatkan partisipasi publik, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan pengawasan. Transparansi pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tercemin melalui beberapa aspek yaitu, informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

Informatif dalam transparansi pengelolaan anggaran menitikberatkan pada penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses publik. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, dimensi ini menjadi penting karena memungkinkan masyarakat memahami proses penganggaran, melakukan evaluasi, serta memantau pembangunan secara terinformasi. Penelitian Fajarudin, (2021) menegaskan bahwa reformasi penyajian laporan keuangan dengan menyediakan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik merupakan syarat utama bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan penguatan akuntabilitas di tingkat daerah.

Keterbukaan dalam transparansi anggaran menyoroti pentingnya akses publik terhadap informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran. Pemerintah yang transparan memberikan masyarakat kemampuan untuk memahami, mengontrol, dan mengevaluasi penggunaan dana publik, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penelitian Fathia, (2025) menemukan bahwa keterbukaan info rmasi anggaran memiliki dampak lebih kuat ketimbang partisipasi publik dalam efektivitas pengelolaan anggaran berkelanjutan di pemerintah pusat.

Pengungkapan menuntut pemerintah menyajikan informasi anggaran secara jelas dan terstruktur agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penelitian Prihatin, (2020)

menjelaskan bahwa pengungkapan anggaran mencakup penyajian data keuangan daerah termasuk informasi lengkap tentang pendapatan, belanja, pembiayaan, dan opini audit yang diunggah secara sistematis dan terstruktur di situs resmi pemerintah daerah, membantu publik mengakses informasi secara transparan.

Di Provinsi Gorontalo, pengelolaan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik. Sebagai salah satu provinsi dengan karakteristik pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang beragam, efektivitas pengelolaan anggaran di OPD sangat menentukan kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi daerah keuangan kinerja, melalui kondisi tersebut dapat dinilai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi benar-benar diterapkan, sekaligus bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan OPD di Provinsi Gorontalo. berikut disajikan data laporan realisasi anggaran dari tahun 2020-2024.

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi
2020	1.739.648.000.000	1.676.215.000.000	96,35%
2021	1.802.137.000.000	1.731.880.000.000	96,10%
2022	1.872.487.105.529	1.836.514.000.000	98,08%
2023	1.900.595.987.884	1.865.432.000.000	98,15%
2024	2.078.476.471.087	1.983.441.271.725	95,43

Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel pagu anggaran dan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran secara umum berada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari persentase realisasi yang setiap tahunnya berada di atas 95%, bahkan pada beberapa tahun mencapai lebih dari 98%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran daerah telah berjalan relatif efektif dan pemerintah daerah mampu merealisasikan sebagian besar anggaran yang telah direncanakan dalam APBD.

Namun demikian, tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa realisasi anggaran belum pernah mencapai 100%, sehingga masih terdapat selisih antara pagu anggaran dan realisasi setiap tahunnya. Selisih ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, seperti kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya, keterlambatan pelaksanaan program, serta perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya akurat. Penurunan persentase realisasi pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran, baik akibat faktor internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dalam kinerja keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, sehingga penelitian ini dilakukan selama periode agustus 2025 hingga Januari 2026. Objek penelitian ini pada OPD Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan di OPD Provinsi Gorontalo. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran dan analisis statistik terhadap variabel-variabel yang diteliti, serta pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut Sugiyono, (2017:30) metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup digunakan sehingga sudah mentradisi Sebagai metode penelitian, metode ini disebut positivistik karena didasarkan pada filsafat positivis.

Variabel dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono, (2017:39) Variabel penelitian adalah atribut, sifat, atau nilai dari individu, organisasi, atau aktivitas yang memiliki variasi tertentu yang ingin dipelajari dan kemudian dievaluasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel: variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akuntabilitas pengelolaan anggaran, transparansi pengelolaan anggaran dan keuangan kinerja.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan metode selama proses penelitian. Seperti yang terlihat dari setting tersebut, data dapat dikumpulkan pada setting (natural setting), di laboratorium menggunakan metode eksperimental, dirumah, dalam diskusi, di jalan, dan di tempat lain. Seperti yang terlihat dari data sumber, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder Sugiyono, (2023:194).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah sebuah kuesioner valid atau tidak. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkap hal-hal yang dapat diungkapkan oleh kuesioner yang bersangkutan (Ghozali I, 2016).

$$R_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = koefisien korelasi antara item dengan total

n = jumlah sampel (responden)

X = skor total item

Y = skor total item

Hasil uji validitas akan menunjukkan tingkat pengakuan yang bervariasi untuk setiap item. Pengakuan yang valid ditetapkan berdasarkan tingkat kepercayaan 95% atau probabilitas kesalahan sebesar 5%. Oleh karena itu, jika koefisien validitas (koefisien korelasi) yang dihasilkan memiliki probabilitas kurang dari 5% ($p > 0,05$), maka item dianggap valid. Ini menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi syarat sebagai indikator yang akurat dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jika koefisien validitas (koefisien korelasi) memiliki probabilitas lebih besar atau sama dengan 5% ($p \leq 0,05$), maka item dianggap tidak valid dan perlu dihapus atau diperbaiki dalam tahap analisis berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa item tersebut tidak memenuhi syarat sebagai indikator yang akurat dan dapat dipercaya

Uji Reliabilitas

Keandalan hasil uji menunjukkan apakah suatu instrumen penelitian tertentu dapat digunakan atau tidak berdasarkan tingkat kemantapan dan ketetapan alat ukur dalam pengertian tersebut. Dalam hal ini, kriteria yang digunakan adalah one shot, yang berarti pengukuran dilakukan hanya sekali dan dibandingkan dengan pertanyaan lain atau dengan kata lain untuk menentukan korelasi antara pertanyaan yang relevan. SPSS menyediakan kemampuan untuk mengukur keandalan menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dianggap andal jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih besar dari 0,6 (Ghozali I, 2016).

$$r_{11} = \frac{(K)}{(K-1)} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

R_{11} = reliabilitas instrument

K = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_t^2 = varians total

Proses pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 16 dengan model korelasi Product Moment dari Pearson. Pengujian mengacu pada metode Sunyoto, (2009) di mana reliabilitas instrumen diterima jika memiliki koefisien *alpha Cronbach* minimal 0,6 yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat diandalkan dan menghasilkan pengukuran yang konsisten. Hal ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Alat Analisis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan dampak akuntabilitas dan transparansi, terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM). Menurut Ghozali I, (2016:3) dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan gabungan dari dua metode statistik yang berbeda, yaitu analisis faktor yang dikembangkan dalam bidang psikologi dan psikometri, serta model persamaan simultan yang dikembangkan dalam ekonometrika. SEM merupakan bagian dari kelompok model statistik yang berupaya menjelaskan hubungan antara beberapa variabel. Ini merupakan salah satu alat statistik yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang sedang diteliti.

Keunggulan teknik SEM terletak pada kemampuannya untuk menguji jaringan model yang kompleks secara efisien dari segi statistik. SEM memungkinkan pengujian simultan dari hubungan yang kompleks antara satu atau lebih variabel tergantung dan satu atau lebih variabel bebas. Baik variabel independen maupun dependen bisa merupakan faktor atau konstruk yang terdiri dari beberapa variabel indikator (Hariyono, (2016:10).

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, beberapa hipotesis statistik disusun untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam kerangka konseptual. Hipotesis statistik digunakan untuk menguji pernyataan yang dapat diuji secara empiris terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan OPD. Hipotesis ini dibedakan menjadi dua jenis: hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel, dan hipotesis alternatif (H_1) yang mengklaim adanya hubungan atau pengaruh. Melalui hipotesis nol (H_0) dapat ditolak dan hipotesis (H_1) dapat diterima. Proses ini penting untuk mengonfirmasi validitas hubungan antar variabel dalam penelitian.

Hipotesis Pertama

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

H_0 : Tidak ada pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

H_a : Ada pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Hipotesis Kedua

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

H_0 : Tidak ada pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Ha: Ada pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Hipotesis Ketiga

Pengaruh Pengaruh akuntabilitas (X1) dan Transparansi Pengelolaan Anggaran (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

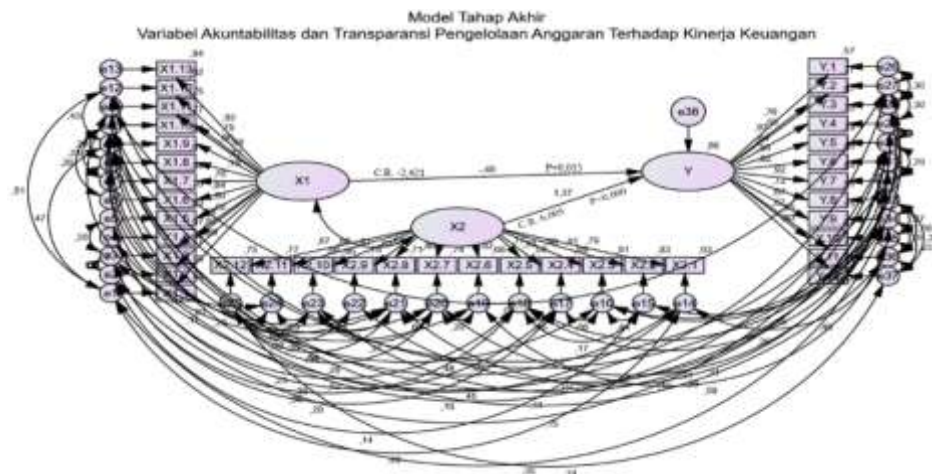
Ho: Tidak ada pengaruh pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi Pengelolaan Anggaran (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Ha: Ada pengaruh pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi Pengelolaan Anggaran (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Parsial

Hasil pembahasan temuan penelitian dilakukan dengan mengacu pada kondisi nyata yang dihadapi responden dilapangan, serta dengan membandingkan beberapa teori dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian pada gambar sebagai berikut:



Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan

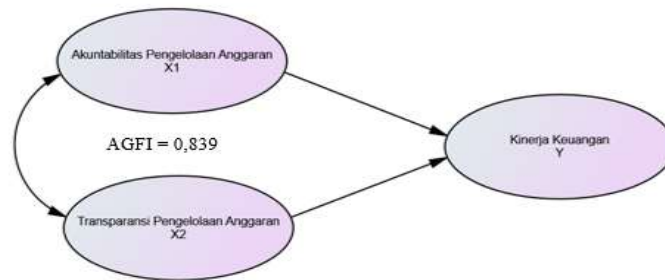
Berdasarkan analisis yang disajikan dalam Tabel 4.27 dan Gambar 4.13, dapat diketahui bahwa nilai t-value atau C.R yang diperoleh adalah $-1,868 < 1,660$, atau nilai P yang terukur sebesar $0,062 > 0,05$. Maka H1 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan di OPD Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dedy Afrianto, et.al (2024) yakni akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan analisis yang disajikan dalam Tabel 4.27 dan Gambar 4.13, dapat diketahui bahwa nilai t-value atau C.R yang diperoleh adalah $6,578 > 1,660$, atau nilai P yang terukur sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aprianti & Asyi, (2020) transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

Uji Simultan

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja keuangan (Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo)



Berdasarkan Tabel 4.27, nilai R-square sebesar 0,839 atau 83,9% menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran secara simultan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan pada Organisasi perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain, 85,8% dari perubahan atau variasi dalam Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh kombinasi kedua variabel tersebut. Hasil ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi memainkan peran penting dalam menentukan Kinerja Keuangan. Dengan demikian sejalan dengan penelitian Widajatun & Kristiastuti, (2020) bahwa hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas hukum, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas pada OPD masih belum berjalan optimal atau belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Transparansi anggaran, seperti keterbukaan informasi, kemudahan akses data anggaran, dan laporan keuangan yang jelas dan

terbuka, terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan. Semakin terbuka OPD dalam menyampaikan informasi, semakin baik pula efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Untuk peneliti selanjutnya Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas sampel penelitian atau menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Selain akuntabilitas dan transparansi, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan OPD, seperti variabel lain seperti sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, atau kualitas perencanaan anggaran. Variabel-variabel tersebut berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih lengkap dan komprehensif. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian tidak hanya pada OPD Provinsi Gorontalo, tetapi juga pada OPD tingkat kabupaten/kota atau daerah lainnya. Dengan memperluas wilayah penelitian, hasil penelitian dapat dibandingkan dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1-4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008-Coaching-d%27equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Ali, C. M., & Zulkifli Boku, U. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jamak*, 1(4), 259-273.
- Anggraini, N., Rhamadoni, F., & Hasymi, I. D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Public Administration Journal*, 4(1), 54-68. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/download/1710/812>
- Aprianti, S., & Asyi, N. F. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 09(12), 1-31.
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Auliza Oktari, Agus Solikhin, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kota jambi dengan kompetensi pegawai sebagai variabel mediasi. *13(03)*, 859-872.

- Blongkod, H. (2023). *Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern* (T. Media (ed.); Pertama). Cv Tahta Media Group.
- BPK RI. (2022). *Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah*. Sekretariat JDIIH.
- Budiandriani, Sri Wahyuni Al Aqzah, Sitti Rahmi Razak, & Nurnajamuddin, M. (2025). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Makassar. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(3), 721–731. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5574>
- Chaerollah. (2024). *Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo*. WIKI Provinsi Gorontalo. <https://wiki.gorontaloprov.go.id/id/perangkat-daerah>
- Dedy Afrianto, Sunardi, Nanik Sisharini. (2024). Pengaruh Perencanaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Pengawasan Sebagai Variabel Moderasi. *JIMEA*, 8(3), 115.
- Dwi, Puput, C. (2025). *Prinsip-Prinsip Dalam Penganggaran*. Kanaka (Training, Consulting and Outbound). <https://www.pelatihan-sdm.net/prinsip-prinsip-dalam-penganggaran/>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 662–671.
- Fathia, S. N. (2025). Hubungan Antara Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik Dalam Green Budgeting Pemerintah Pusat kebijakan publik di banyak negara , termasuk Indonesia . Sebagai respons terhadap tantangan luas kepada masyarakat terhadap informasi anggaran . Salah satu. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(April).
- Ghozali I. (2016). *Structural Equation Modelling: Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, G., Blongkod, H., & R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2.1), 951–956.
- Ifada, B. I., & Ardini, L. (2023). ... Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5527/5567>
- Jin, P., & Wang, Z. (2025). Digital budget supervision governance and local

- government fiscal transparency. *International Review of Economics and Finance*, 102(April), 104306. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104306>
- M.F. Ramadhan, H. Blongkod, dan Siti Pratiwi. H. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor Transportasi yang Terdaftar di BEI*. 8(2), 1627–1645. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1434>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardismo (ed.); Terbaru /). ANDI (Anggota IKAPI). https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Muhart. (2022). Belanja Daerah, Kekayaan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 89–102.
- Murtin A. & Rahmawati S.I. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 17–28.
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Oktaviani, A. E., Hermawan Sapto, & Waluyo. (2022). Kebijakan Pengawasan Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid- 19. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8, 199–211.
- Panjaitan, H. M., & Dev, M. (2023). *Kebijakan pengelolaan keuangan daerah*. 50.
- Pera, Charmelia M. R. De Vollys, L. L. G., & Kiak, N. T. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. *GLORY Jurnal Ekonomi&Ilmu Sosial*, 5(2), 1–6. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/13057>
- Pingki Veronika dan Nugraeni Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 938–948.
- Polonia, B. (2025). *Penerapan Prinsip Good Governance*. Bknpolonia.Com. <https://bknpolonia.com/2025/01/penerapan-prinsip-good-governance>
- Prihatin, L. J. (2020). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4), 1–14. <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59259>
- Rahima Br Purba. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (1st ed.). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Rifky Sumanto. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kota Jambi Dan Provinsi Jambi)*.

- Riswanto, N. (2016). Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management on Local Government Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1-7. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75336/NATAKRISWANTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. file:///C:/Users/QUEEN/Documents/kuantitatif soraya/teori 2.4.2.pdf
- Santoso. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75-94. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.325>
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1-27.
- Sinurat, M., Sudrajat, I., & Komedi, K. (2023). Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(2), 216-232. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3922>
- Sudayo Y, Sjarif D, Sofiati N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Putri Christian (ed.); 1st ed.). ANDI (Anggota IKAPI). https://www.google.co.id/books/edition/Keuangan_di_Era_Otonomi_Daerah/dHI9DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Penerbit Alfabeta (ed.); Cetakan Ke).
- Vira Annisa, Rio Monoarfa, dan Lukman Pakaya. (2023). Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Economic Dan Digital Business Review*, 4(2), 155-121. <https://doi.org/2774-2563>
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966-2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).